

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB 26 Tahun 2020 Lampiran halaman 40)
Fenomena / Penyebab	Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022, menunjukkan capaian Indeks RB Pemkab Lumajang Tahun 2021 masih rendah sebesar 58,94 dengan kategori "CC".

1. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 37 menyebutkan bahwa sub komponen kualitas perencanaan pada aspek hasil antara point g menentukan nilai Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Skema Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Halaman 37-38 pada sub komponen hasil point a sub komponen point b.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 37 menyebutkan bahwa sub komponen kualitas perencanaan pada aspek hasil antara point g menentukan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

MAKA

JIKA

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	
Indikator	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) (Penelitian "PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN [IKP] PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA oleh Rita Ariani dalam Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab Kukar Vol.12 No.1 Tahun 2018)
Fenomena / Penyebab	1. Belum optimalnya perencanaan yang ditunjukkan dengan : Nilai Variabel pada IRB : komponen pengungkit-hasil antara area perubahan masih rendah 5,17 (tahun 2020) dan 5,61 (Tahun 2021) Berdasarkan Hasil Evaluasi KemenPAN RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sesuai surat KemenPAN RB Nomor : B/311/RB06/2022 Tanggal 7 Maret 2022 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemkab Lumajang Tahun 2020 dan 2021 pada komponen perencanaan kinerja belum optimal karena belum mencapai bobot maksimal dengan nilai 22,70 dan 22,83 (Penilaian KemenPAN RB Tahun 2020-2021)

1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH pasal 170 ayat 1 dan pasal 180
2. Menurut policybrief yang di susun oleh Siti Muawanah dan Umi Muzaynah dari Litbang Kemenag RI dan diterbitkan dalam <http://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/> pada tahun 2019 dengan judul "Penguatan Sosialisasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Kepada Pemangku Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Agama", halaman 2 di sebutkan bahwa Kurang optimalnya Litbang memberikan dukungan terhadap kementerian diakui oleh Lakitan (2011:1) yang menyatakan bahwa citra litbang belum positif karena dianggap belum berhasil memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian mereka hanya menjadi laporan yang tertumpuk di rak perpustakaan (Kasanah, 2018) dan belum menjadi rujukan pembuatan kebijakan.

Penelitian "PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS PERENCANAAN [IKP] PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA oleh Rita Ariani dalam Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab Kukar Vol.12 No.1 Tahun 2018, menyatakan bahwa konsistensi dimensi proses dan isi serta keselarasan jaminan tindak lanjut berpengaruh pada kualitas perencanaan pembangunan

MAKA

JIKA

Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	
Indikator	1. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (Permendagri 86 Tahun 2017 halaman 231 point 1.5) 2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbang (Permendagri 86 Tahun 2017 halaman 232 point 4.2)

Fenomena / Penyebab	<p>1. Terdapat trend menurunnya Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dari Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 yaitu dari 100 % menjadi 85 % (LKJIP Kabupaten Lumajang Tahun 2020 dan LPPD Kabupaten Lumajang Tahun 2021)</p> <p>2. Capaian pemanfaatan hasil kelitbangan Bappeda Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021 menurut hasil evaluasi sebesar 100 % (LKJIP Kabupaten Lumajang Tahun 2021)</p>
---------------------	---

Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan OPD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Indikator	Presentase Dokumen Perencanaan Perekonomian yang dimanfaatkan OPD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Indikator	Presentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan OPD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penelitian yang berkredibilitas baik sebagai upaya penyediaan kajian penelitian yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah

Indikator	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah

Indikator	persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan otonomi daerah
-----------	--

Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Persentase Tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator	Persentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja
-----------	---

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
---------------------	---

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Indikator	Persentase Kajian bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan
-----------	---

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan

Indikator	Persentase Kajian bidang Bidang Sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan
-----------	---

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indikator	Persentase Kajian bidang Bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan
-----------	---

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator	Persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi
-----------	---

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
---------------------	--

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi pengadaan BMD
-----------	-------------------------------------

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
-----------	--

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD
-----------	--

Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
---------------------	--

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Indikator	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Indikator	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Indikator	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Indikator	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Indikator	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Indikator	Persentase Tahapan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
Indikator	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
Indikator	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Konsultasi Publik	
Indikator	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
Indikator	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
Indikator	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
Indikator	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
Indikator	Persentase tahapan Analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Indikator	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
Indikator	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
Indikator	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
Indikator	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dimanfaatkan OPD
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	
Indikator	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Fenomena / Penyebab	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

